

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2013. *Azas. Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pusat Statistik Wonosobo. 2010. *Wonosobo Dalam Rangka Wonosobo in Figures 2009*. Wonosobo: BPS Wonosobo.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dimiyati, Khudzaifah & Wardiono, Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Hamzah, Andi. 1986. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Harahap, M.Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HK, Harmien. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi..* Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi. Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kajari Wonosobo. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Wonosobo Tahun 2014*. Wonosobo: Kajari Wonosobo.

- Lubis, M. dan Scott, J.C. 1997. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Nirwanto, D.Andhi. 2013. *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*. Jakarta: Bima Aksara.
- Prodjodikoro, Wiryo. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Prodjohamidjoyo, M. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purbacaraka dan Soekanto, Soerjono. 1979. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sabiar, Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Setijono, Pudji Basuki. 2007. *Korupsi (Bahaya, Karakteristik dan Penanggulangannya)*. Semarang: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- Setijono, Pudji Basuki. 2014. *Korupsi (Bahaya, Karakteristik, dan Penanggulangannya)*. Semarang: Kejati Jawa Tengah.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono. 1998. *Kejahatan Ekonomi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Surbakti, Natangsa. 2009. *Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Web/Internet

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lekcrime/article/view/904>. diunduh Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 21.57.

<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html> diunduh tanggal 13 Januari 2015. pukul 20.30 WIB.

<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-pidsus>. diunduh Jum'at, 27 November 2015 pukul 11: 23.

Aturan Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat (6) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.